KAMBOJA: KEBANGKITAN DAN KEJATUHAN REZIM KHMER MERAH

Oleh: Yappi Manafe
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 1982

PENGANTAR

Pada awalnya, Kamboja (Khmer Merah) menyerang Vietnam, sehingga Vietnam mengirimkan pasukannya ke Kamboja untuk memerangi Khmer Merah. Mereka merebut kembali ibu kota Phnom Penh pada 7 Januari 1979. Pol Pot mencari perlindungan di Thailand. Pasukan Vietnam ditarik mundur pada tahun 1989, dan negara tersebut kembali berganti nama menjadi Kamboja. Pol Pot tinggal di Thailand selama hampir 20 tahun, dan menurut berbagai sumber, ia meninggal dalam tidurnya pada April 1998. Sebanyak 1,7 – 2 juta warga Kamboja dibunuh selama genosida Kamboja, atau sekitar seperempat dari jumlah keseluruhan penduduk negara tersebut.

Pol Pot, pemimpin Angkar (organisasi yang juga dikenal sebagai Khmer Merah), meninggal dunia pada April 1998. Ketika orang memikirkan Kamboja, dua hal sering kali terlintas dalam pikiran. Yang pertama adalah Angkor Wat, sebuah kompleks kuil kuno yang dibangun selama periode Angkor dari abad kesembilan hingga abad ke-15. Periode Angkor ditandai dengan keberadaan Kekaisaran Khmer yang kuat dan luas, memiliki kebudayaan yang sangat maju, serta menghasilkan karya seni dan arsitektur yang megah. Bagi banyak orang Kamboja, periode ini melambangkan puncak peradaban mereka. Hal kedua yang sering terlintas dalam pikiran membangkitkan serangkaian gambaran yang sangat berbeda: periode Khmer Merah, yang memerintah negara tersebut dari tahun 1975 hingga 1979. Rezim ini berusaha memurnikan bangsa dari dugaan korupsi dan kecenderungan kontrarevolusioner untuk mewujudkan visi komunis utopisnya bagi Kamboja. Namun, ideologi dan taktik rezim tersebut begitu ekstrem sehingga hampir semua aspek dan lapisan masyarakat Kamboja menjadi sasaran penghancuran, dan pada akhirnya rezim ini bertanggung jawab atas kematian sekitar dua juta orang dari tujuh juta penduduk negara tersebut. Paruh kedua abad ke-20 merupakan periode perubahan radikal bagi Kamboja, dimulai setelah revolusi dan perang kemerdekaan melawan Prancis pada tahun 1953, dan berakhir pada tahun 1979 dengan sebuah negara yang mengalami trauma, kelaparan, serta dipenuhi ranjau darat dan sisa-sisa jasad orang-orang yang tewas selama empat tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu 26 tahun tersebut, Kamboja mengalami pergantian beberapa pemerintahan, sistem politik, serta perubahan sosial dan budaya yang menyeluruh akibat perang, modernitas, globalisasi, dan ideologi komunis radikal. Sepanjang berbagai periode penuh gejolak ini, beragam aliansi antara faksi-faksi yang saling bersaing dan para pemimpinnya dibentuk, diputuskan, dan kemudian dibentuk kembali. Bagaimana rakyat Kamboja, sejak tahun 1979, berusaha membangun kembali kehidupan dan komunitas mereka serta memulihkan diri dari masa lalu.

PERJUANGAN UNTUK KEMERDEKAAN (1863–1953)

Kamboja telah berada di bawah kekuasaan kolonial sejak tahun 1863, ketika Raja Norodom mengundang Prancis untuk menjadi pelindung negaranya. Raja melakukan hal ini sebagai upaya membebaskan Kamboja dari tindakan agresif negara-negara tetangganya, Thailand dan Vietnam, yang berulang kali menyerang Kamboja dan mengancam keberadaannya. Raja percaya bahwa kehadiran kolonial Prancis akan memberikan Kamboja kesempatan untuk terbebas dari gangguan serta memperoleh perdamaian dan keamanan yang relatif. Warisan kolonialisme Prancis—khususnya bagaimana kolonialisme tersebut memengaruhi pemikiran sosial dan politik di Kamboja—memiliki dampak yang beragam. Di satu sisi, Prancis memperkenalkan kepada rakyat Kamboja gagasan-gagasan tentang nasionalisme dan modernitas yang mulai mengakar pada awal abad ke-20 (meskipun bukan merupakan tujuan Prancis untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada rakyat jajahannya). Salah satu cara paling signifikan yang memungkinkan hal ini terjadi adalah melalui pemberian beasiswa kepada kaum muda Kamboja yang berpendidikan dari keluarga kelas menengah dan elite untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas di Prancis. Di sisi lain, Prancis gagal menyediakan pendidikan bagi sebagian besar penduduk Kamboja; bahkan, sebelum kemerdekaan, negara tersebut hanya memiliki satu sekolah menengah atas. Gerakan kemerdekaan dari Prancis muncul di tengah kekacauan Perang Dunia Kedua dan periode awal pascaperang. Gerakan ini, yang disebut Khmer Issarak, merupakan koalisi longgar para aktivis anti-Prancis dan antikolonial yang mendapat dukungan dari pemerintah Thailand dan Viet Minh, sekutu komunis di negara tetangga Vietnam. Namun, persatuan kelompok ini segera mulai melemah, dan gerakan tersebut terpecah antara mereka yang berpihak kepada Viet Minh dan mereka yang berjuang melawannya. Di antara anggota gerakan ini terdapat kelas intelektual elite baru, beberapa di antaranya merupakan bagian dari kelompok yang belajar di Prancis pada akhir 1940-an dan awal 1950-an. Mereka termasuk Saloth Sar (yang kemudian dikenal sebagai Pol Pot), Son Sen, Ieng Sary, dan Ieng Thirith (istri Ieng Sary). Tokoh-tokoh ini kemudian menjadi pemimpin Partai Komunis Kampuchea, yang lebih dikenal sebagai "Khmer Merah", yang berarti Khmer merah/komunis. (Kampuchea adalah nama lain untuk Kamboja, sedangkan Khmer adalah nama bahasa utama dan kelompok etnis utama di Kamboja.) Selain menganut gagasan-gagasan nasionalisme, para calon pemimpin ini juga mempelajari ajaran komunis Lenin dan Marx, yang membentuk gagasan serta rencana mereka bagi masa depan bangsa mereka.

DARI KEMERDEKAAN MENUJU KAMPUCHEA DEMOKRATIS (1953–1975)

Ketika Kamboja sedang berusaha membangun pijakannya sebagai negara yang baru merdeka, dinamika Perang Dingin sudah berlangsung dengan intensitas penuh. Dalam perebutan kekuasaan dan keamanan, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China semuanya berjuang untuk memperoleh pengaruh dan kendali atas negara-negara yang lebih kecil.

Salah satu kawasan tempat persaingan ini berlangsung paling sengit adalah Asia Tenggara. Kamboja, Vietnam, dan Laos, yang secara kolektif dikenal sebagai Indochina pada masa kolonialisme Prancis, terjerat dalam persaingan ini ketika mereka berjuang membebaskan diri dari kekuasaan kolonial. Setelah Kamboja memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1953, raja negara tersebut, Norodom Sihanouk, menyerahkan takhtanya kepada ayahnya agar ia dapat menjadi kepala negara Kamboja. Sihanouk merupakan sosok karismatik yang memiliki kegemaran menulis, musik, dan terutama pembuatan film. Ia juga selalu mampu menyesuaikan diri dengan arus perubahan yang terus-menerus melanda negaranya. Banyak rakyat Kamboja pada umumnya mengenang periode Sihanouk sebagai masa keharmonisan dan kerja sama, dan ia melakukan banyak hal untuk memperluas pendidikan di Kamboja serta membangun dan memodernisasi ibu kota Phnom Penh. Namun, 17 tahun masa pemerintahannya juga merupakan periode yang ditandai oleh korupsi yang meluas serta ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin parah; sementara kota-kota berkembang menjadi pusat-pusat kosmopolitan modern yang menawarkan pendidikan dan berbagai peluang bagi penduduknya, kehidupan di pedesaan bagi jumlah petani yang jauh lebih besar relatif tidak berubah. Selain itu, pemerintah Kamboja di bawah Sihanouk tidak menoleransi perbedaan pandangan ideologis dan politik, termasuk penentangan dari kelompok-kelompok komunis yang mulai terbentuk di dalam negeri.

PERANG VIETNAM, PENGEBOMAN AMERIKA SERIKAT, DAN KUDETA 1970

Selain catatannya yang beragam dalam mengelola urusan dalam negeri Kamboja, keberhasilan Sihanouk dalam menghadapi kekuatan-kekuatan global yang lebih besar yang bergejolak di sekitar kerajaan kecilnya juga menunjukkan hasil yang beragam. Masa pemerintahannya kurang lebih bertepatan dengan Perang Indochina Kedua, yang juga dikenal sebagai "Perang Amerika" di Vietnam dan sebagai "Perang Vietnam" di banyak negara Barat. Konflik ini dimulai pada tahun 1955, meningkat pada tahun 1960-an, dan berakhir ketika Amerika Serikat menarik diri dari Vietnam Selatan pada tahun 1975. Konflik ini merupakan perang proksi antara Vietnam Utara, yang didukung oleh Uni Soviet dan China, dan Vietnam Selatan, yang didukung oleh Amerika Serikat serta sekutu-sekutu nonkomunis lainnya. Vietnam Utara, di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh, berusaha membangun pangkalan dan jalur pasokan melalui Laos dan Kamboja untuk mengirimkan pasukan serta perbekalan kepada para pendukung mereka di selatan. Jalur ini kemudian dikenal sebagai Jalur Ho Chi Minh. Sementara hal ini berlangsung, pasukan komunis Vietnam juga berusaha mendukung gerakan komunis Kamboja, yang mencakup Khmer Merah. Amerika Serikat semakin terlibat dalam perang ini selama beberapa masa kepresidenan berturut-turut; tidak lama setelah menjabat pada awal tahun 1969, Presiden Richard Nixon melancarkan kampanye pengeboman rahasia dengan nama sandi Operasi Menu, yang bertujuan menghancurkan pangkalan dan jalur pasokan Vietnam Utara yang melintasi Kamboja.

Sepanjang tahun-tahun penuh gejolak setelah kemerdekaan, Sihanouk menjalankan kebijakan netralitas antara pihak komunis (yaitu Vietnam Utara dan China) di satu sisi dan Amerika Serikat di sisi lain. Namun, pada saat itu, sebagian pihak mencurigai bahwa ia menunjukkan keberpihakan kepada perjuangan komunis dengan mengizinkan Vietnam Utara mendirikan pangkalan di wilayah Kamboja. Di tengah meningkatnya ketegangan politik ini, Sihanouk digulingkan melalui kudeta tanpa pertumpahan darah pada tahun 1970 ketika ia sedang berada di luar negeri. Orang yang menggantikannya adalah perdana Menterinya, Marsekal Lon Nol. Amerika Serikat tidak senang dengan sikap Sihanouk yang mengakomodasi Vietnam Utara dan mendukung pergantian kepemimpinan tersebut. Khmer Merah, dengan dukungan Vietnam Utara, telah bertempur di wilayah pedesaan Kamboja dan akhirnya mulai merebut kendali wilayah dari pemerintah Lon Nol. Kelompok-kelompok pejuang Kamboja lainnya yang memberontak juga terlibat dalam perebutan kendali atas negara tersebut. Menambah kekerasan dan kekacauan di wilayah pedesaan, pada tahun 1973, Amerika Serikat meningkatkan kampanye pengebomannya di Kamboja, yang kini diberi nama sandi Operasi Freedom Deal. Dari total 500.000 ton bahan peledak yang dijatuhkan oleh militer Amerika Serikat di Kamboja antara tahun 1969 dan 1973, sekitar setengahnya dijatuhkan dalam periode tujuh bulan pada tahun 1973. (Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menjatuhkan sekitar 180.000 ton bahan peledak di Jepang selama Perang Dunia Kedua.) Dalam banyak kesempatan, pesawat pengebom B-52 Amerika Serikat meleset dari sasaran mereka, yang mengakibatkan kematian penduduk dan kehancuran seluruh desa di Kamboja. Meskipun perkiraan jumlah kematian warga Kamboja akibat pengeboman ini tidak jelas, angkanya berkisar antara 50.000 hingga 300.000 orang. Tidak mengherankan, pengeboman tersebut menimbulkan kemarahan dan ketakutan di kalangan rakyat Kamboja, sehingga mendorong sebagian penduduk meninggalkan pedesaan untuk mencari perlindungan di ibu kota Phnom Penh. Sebagian lainnya bergabung dengan Khmer Merah, yang diyakini oleh rakyat Kamboja sedang berjuang di pihak mereka karena janji-janji Khmer Merah untuk menyediakan lebih banyak beras serta meringankan pajak dan berbagai beban serta pembatasan lain yang diberlakukan terhadap mereka. Namun, terdapat faktor penting lainnya yang mendorong semakin banyak petani Kamboja bergabung dengan Khmer Merah: setelah Sihanouk digulingkan pada tahun 1970, ia bergabung dengan Khmer Merah dari pengasingannya di China dan, melalui siaran radio, menyerukan kepada sesama rakyat Kamboja untuk bergabung dengannya. Mengingat pengaruh dan daya tariknya yang luas, banyak orang, terutama dari pedesaan, menanggapi seruannya, sehingga turut mendorong kebangkitan Khmer Merah hingga akhirnya berkuasa. Tentu saja, tidak semua orang secara sukarela memilih untuk bergabung dengan Khmer Merah. Ketika Khmer Merah mengambil alih kendali suatu wilayah, mereka langsung merekrut secara paksa orang-orang yang cukup umur untuk bertempur atau melayani gerakan tersebut dengan cara lain. Menolak berarti kematian. Pada tahun 1973, Khmer Merah telah menguasai sebagian besar wilayah pedesaan dan mulai mewajibkan penduduk desa untuk tinggal dalam koperasi serta terlibat dalam proyek-proyek pertanian berskala besar. Mereka juga mulai mengeksekusi orang-orang yang mereka tuduh sebagai pengkhianat.

Ketika sebagian besar wilayah pedesaan berada di bawah kekuasaan Khmer Merah, situasi di ibu kota Phnom Penh menjadi semakin genting. Jumlah penduduk kota terus membengkak, dan persediaan makanan semakin menipis karena produksi beras terganggu akibat perang saudara dan pemblokiran jalur pasokan oleh Khmer Merah. Pemerintah Lon Nol tidak lagi mampu mempertahankan posisinya dalam menghadapi Khmer Merah, terutama setelah Amerika Serikat menghentikan sebagian besar pengebomannya setelah tahun 1973 dan pasukan Vietnam Selatan menarik diri dari Kamboja, sehingga pasukan pemerintah Lon Nol harus mempertahankan diri tanpa bantuan. Helikopter terakhir yang membawa warga negara Amerika Serikat yang masih tersisa dan sejumlah pejabat tinggi Kamboja meninggalkan negara tersebut pada 12 April 1975. Lima hari kemudian, pemerintahan Lon Nol runtuh dan tentara Khmer Merah memasuki Phnom Penh.

REZIM KHMER MERAH DAN "KAMPUCHEA DEMOKRATIS" (1975–1979)

Para tentara Khmer Merah yang masih berusia remaja dan merebut kota tersebut—tidak berpendidikan, menjadi keras akibat perang, dan dipersenjatai dengan berbagai senjata—merupakan sosok-sosok asing bagi penduduk kota yang berpendidikan dan berbudaya. Pada awalnya, sebagian penduduk Phnom Penh merasa lega karena perang telah berakhir. Namun, rasa lega apa pun yang mereka rasakan segera lenyap. Tentara Khmer Merah memerintahkan penduduk kota untuk segera mengosongkan rumah mereka dan menuju ke pedesaan. Alasan yang mereka berikan adalah bahwa setelah mereka mengambil alih ibu kota, Amerika Serikat hampir pasti akan mengebom kota tersebut. Penduduk tidak diberi waktu untuk mengemas barang-barang mereka dan diperintahkan pergi di bawah ancaman senjata. Tidak ada pengecualian. Para pasien diseret dari tempat tidur rumah sakit mereka dan perempuan dipaksa melahirkan di sepanjang jalan. Anak-anak, orang lanjut usia, mereka yang lemah, dan orang-orang sakit semuanya harus terus bergerak atau menghadapi risiko ditembak. Di bawah terik matahari bulan April di Kamboja, banyak orang yang lemah meninggal di sepanjang jalan, dan jasad mereka dibiarkan membengkak akibat panas.

Baik penduduk kota maupun mereka yang tinggal di pedesaan ditugaskan untuk bekerja di kamp-kamp kerja pertanian guna menanam padi dan membangun bendungan serta tanggul, atau mengerjakan proyek-proyek pertanian lainnya. Khmer Merah, yang hanya dikenal sebagai Angkar ("organisasi"), juga berusaha menghapus semua sisa peninggalan rezim sebelumnya yang mereka anggap korup atau berbahaya. Gagasan mereka adalah menghapus seluruh tatanan masyarakat yang lama agar mereka dapat memulai kembali pembangunan masyarakat baru dari "tahun nol". Hal ini berarti meninggalkan dan menghancurkan mobil, perhiasan, uang, pakaian (selain pakaian hitam khas petani), radio, buku, segala jenis barang pribadi, dan apa pun yang melambangkan kekayaan, kelas sosial, atau individualitas. Selain menghapus kepemilikan pribadi, Khmer Merah juga bertekad memberantas gagasan-gagasan yang dianggap bertentangan dengan revolusi mereka.

Hal ini mencakup agama, pendidikan, dan pengetahuan. Mereka menutup sekolah-sekolah, menghancurkan perpustakaan dan tempat-tempat ibadah, serta melarang agama. Namun, bahkan hal itu belum cukup; dalam keinginan mereka untuk memurnikan bangsa dari segala bentuk penentangan dan unsur-unsur yang dianggap merusak, mereka juga memusnahkan siapa pun yang dianggap sebagai ancaman. Sebagai contoh, ketika tentara Khmer Merah merebut Phnom Penh, mereka segera mengeksekusi para pemimpin pemerintahan dan militer. Mereka juga menargetkan orang-orang kaya, kaum terpelajar, dan tokoh-tokoh agama untuk dimusnahkan. Penduduk kota yang berhasil selamat dari gelombang awal eksekusi ini segera belajar menyembunyikan latar belakang pendidikan mereka dan menghindari menunjukkan tata krama yang mungkin dikaitkan dengan kelas sosial yang lebih tinggi.

IDEOLOGI KHMER MERAH

Serangkaian keyakinan yang membentuk kehidupan di bawah Kampuchea Demokratis, yang merupakan nama resmi yang diberikan kepada Kamboja oleh Khmer Merah, bersumber dari pemikiran Marxis-Leninis dan Maois serta mengintegrasikan ideologi komunis dengan gagasan-gagasan agama dan budaya Kamboja yang telah ada sebelumnya. Hasilnya adalah sebuah filosofi utopis yang berusaha membebaskan Kamboja dari ketergantungan pada negara-negara lain. Pada tahun 1976, seorang kader Khmer Merah menulis dalam sebuah buku catatan bahwa tujuan revolusi adalah menciptakan "demokrasi nasional dan revolusi yang menyediakan sawah bagi rakyat banyak" serta membersihkan bangsa dari segala bentuk feodalisme, kapitalisme, dan imperialisme. Program revolusioner ini mengharuskan setiap individu untuk senantiasa waspada terhadap musuh-musuh revolusi. Akibatnya, Khmer Merah menggunakan mata-mata untuk melaporkan segala kegiatan yang mungkin ditafsirkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ambisi gerakan revolusioner tersebut. Tingkat ketidakpercayaan di dalam Kampuchea Demokratis menjadi begitu meluas ketika semakin banyak pengkhianat "ditemukan" dan semakin banyak orang yang benar-benar memiliki hubungan atau diduga memiliki hubungan dengan mereka diidentifikasi melalui pengakuan yang dipaksakan. Ketika "musuh-musuh" revolusi Khmer Merah ditangkap dan disiksa hingga mengakui kegiatan mereka yang diduga merupakan pengkhianatan, mereka juga diwajibkan menyebutkan nama orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka dan yang menjadi bagian dari "jaringan" mereka yang diduga ada. Seperti sebuah ramalan yang menjadi kenyataan dengan sendirinya, ketidakpercayaan tersebut terus dipertahankan, dibenarkan, dan direproduksi, sehingga menciptakan logika yang menyimpang, yang kesimpulannya hanya dapat berupa pemusnahan total. Pada tahun 1977, ketidakpercayaan di kalangan pimpinan telah mencapai tingkat paranoia yang ekstrem dan pembersihan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pengkhianat semakin meningkat. Bahkan jajaran kader Khmer Merah sendiri juga mengalami pembersihan, sehingga semakin banyak dari mereka beserta keluarga mereka dikirim ke penjara, tempat mereka disiksa dan kemudian dibunuh.

Penjara yang paling terkenal karena kekejamannya adalah S-21, sebuah sekolah menengah atas di Phnom Penh yang diubah menjadi penjara dan pusat penyiksaan yang dikelola oleh Kaing Guek Eav, yang juga dikenal sebagai Duch. Dari sekitar 15.000 tahanan yang dikirim ke S-21, hanya tujuh orang yang selamat. Para tahanan yang ditempatkan di sana difoto dan disiksa untuk memperoleh pengakuan. Setelah para interogator selesai, jenazah para tahanan diangkut dengan truk ke "ladang pembantaian" (killing fields) di luar Phnom Penh. Terdapat sekitar 20.000 kuburan massal semacam ini di berbagai lokasi di seluruh negeri.

Tahun-tahun pemerintahan rezim Pol Pot merupakan neraka yang nyata. Orang-orang yang mengalami masa tersebut bertahan hidup hanya dengan satu sendok sayur bubur beras encer sehari dan dipaksa bekerja selama sebagian besar waktu mereka terjaga. Mereka dipisahkan dari keluarga mereka, dipaksa makan di koperasi, dan diperlakukan lebih buruk daripada hewan ternak. Kehidupan di bawah Khmer Merah dijalani dalam ketakutan terus-menerus akan dilaporkan bahkan karena tindakan-tindakan kecil, seperti mengambil kelapa dari pohon atau membiarkan ternak merumput di ladang yang salah. Sejumlah besar orang, baik petani maupun penduduk kota, meninggal akibat kondisi tersebut. Kelompok minoritas Muslim Cham dan kelompok minoritas etnis Vietnam secara khusus menjadi sasaran penganiayaan dan pemusnahan. Penduduk kota tentu saja mengalami pekerjaan yang lebih berat dan kecurigaan yang lebih besar dibandingkan para petani. Pada akhirnya, diperkirakan dua juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak tewas di bawah rezim tersebut. Pada tahun 1977, bentrokan-bentrokan juga mulai pecah antara Khmer Merah dan Vietnam, yang pada saat itu telah berada di bawah kendali pemerintahan komunisnya. Pada Desember 1978, pasukan Vietnam memasuki Kamboja dan menggulingkan Khmer Merah beserta pemerintahan Kampuchea Demokratis mereka pada Januari 1979. Sebagai penggantinya, mereka membentuk pemerintahan baru yang bersahabat dengan Vietnam, yaitu Republik Rakyat Kampuchea (People's Republic of Kampuchea, PRK). Para pemimpin Khmer Merah dan banyak pengikut mereka melarikan diri ke perbatasan Thailand, tempat mereka mencari perlindungan dan melanjutkan perjuangan melawan PRK yang didukung Vietnam. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan suara untuk tidak mengakui pemerintahan baru di Kamboja, dan sebagai gantinya kursi-kursi Kamboja diberikan kepada Khmer Merah, yang masih bersekutu dengan Norodom Sihanouk dan sebuah partai politik nonkomunis. Pada tahun-tahun awal setelah jatuhnya Kampuchea Demokratis, rakyat Kamboja mengalami kelaparan, trauma, dan tercerai-berai di seluruh negeri. Sebagian telah melarikan diri dari rezim tersebut sebelumnya dan kini berada di kamp-kamp pengungsi di Thailand dan Filipina. Keluarga-keluarga terpisah dan sering kali tidak mengetahui apakah saudara perempuan, saudara laki-laki, orang tua, atau pasangan mereka masih hidup atau telah meninggal. Bagi banyak orang, rumah-rumah tempat mereka dahulu tinggal sudah tidak ada lagi. Infrastruktur negara tersebut hancur, dan ibu kota yang dahulu indah telah berubah menjadi kawasan perkotaan yang porak-poranda, dipenuhi bangunan-bangunan yang menghitam dan rusak akibat pengeboman serta tidak layak untuk dihuni.

Pada tahun 1979, Pol Pot, pemimpin Khmer Merah, dan Ieng Sary, seorang anggota lingkaran dalamnya, diadili secara in absentia oleh pemerintah Republik Rakyat Kampuchea (PRK) atas kejahatan mereka selama masa Kampuchea Demokratis. Mereka dinyatakan bersalah melakukan genosida, tetapi tidak ada hukuman yang dijatuhkan. Hal ini tidak berarti bahwa Khmer Merah menyerah; kenyataannya, banyak tentara dan pemimpinnya terus bertempur, dan perjuangan untuk mengungkap kebenaran serta mewujudkan suatu bentuk keadilan dan rekonsiliasi masih membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi.

TAHUN-TAHUN PASCA-GENOSIDA (1979–SEKARANG)

Pada tahun 1989, ketika Perang Dingin mendekati akhir, Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja. Tanpa dukungan Uni Soviet, mempertahankan pemerintahan PRK di Kamboja menjadi urusan yang terlalu mahal bagi Vietnam. Pada Oktober 1991, diadakan pertemuan-pertemuan di Paris yang menghasilkan Persetujuan tentang Penyelesaian Politik Menyeluruh atas Konflik Kamboja (Agreements on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict), yang dikenal sebagai Perjanjian Paris. Perjanjian-perjanjian tersebut secara resmi mengakhiri konflik antara Khmer Merah dan Vietnam, serta membentuk Otoritas Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja (United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTAC).

Mandat UNTAC mencakup hal-hal berikut:

- Mewujudkan perdamaian;
- Memulangkan para pengungsi dan orang-orang yang mengungsi dari tempat tinggal mereka;
- Menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil;
- Mengorganisasi dan mengendalikan administrasi sipil;
- Memelihara hukum dan ketertiban;
- Melindungi hak asasi manusia; dan
- Secara umum membantu pembangunan kembali dan pemulihan negara tersebut.

Mandat ini direncanakan untuk dilaksanakan dengan mempertemukan pemerintah Kamboja di bawah Hun Sen dan tiga faksi oposisi:

- Khmer Merah;
- Partai kerajaan FUNCINPEC (Front Persatuan Nasional untuk Kamboja yang Merdeka, Netral, Damai dan Kooperatif) yang dipimpin oleh putra Sihanouk, Pangeran Ranariddh; dan
- Partai Demokrat Liberal Buddha.

Pada tahun 1993, UNTAC menyelenggarakan pemilihan umum nasional yang diharapkan akan diikuti oleh keempat partai tersebut. Namun, Khmer Merah memboikot pemilihan umum tersebut, sehingga memperpanjang perang saudara.

Setelah pemilihan umum, sebuah pemerintahan koalisi yang rapuh dibentuk dengan Hun Sen dan Pangeran Ranariddh sebagai Perdana Menteri bersama. Pada tahun 1994, pemerintah Kamboja mengesahkan sebuah keputusan yang melarang Khmer Merah, yang telah kembali menguasai sebagian wilayah Kamboja selama perang saudara. Salah satu wilayah yang dikuasainya adalah kota Pailin yang kaya akan sumber daya mineral di perbatasan Thailand, sehingga memungkinkan Khmer Merah membiayai gerakannya melalui penjualan ilegal batu permata, kayu, dan produk-produk lainnya. Meskipun demikian, peperangan tersebut melemahkan Khmer Merah dan menimbulkan perpecahan di antara para pemimpin tingginya.

Pada tahun 1996, Ieng Sary, yang merupakan salah satu perancang utama dan pemimpin Khmer Merah, menerima tawaran amnesti dari pemerintah Kamboja. Keputusan ini memicu pembelotan massal tentara Khmer Merah, yang banyak di antaranya kemudian menjadi tentara pemerintah. Sementara itu, para pemimpin Khmer Merah lainnya, seperti Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan, dan Ta Mok yang terkenal kejam (dikenal sebagai "si Jagal"), terus melanjutkan perjuangan mereka. Namun, terdapat banyak perselisihan di antara mereka, dan Pol Pot akhirnya diadili oleh Khmer Merah sendiri. Pada April 1998, ia meninggal dalam tidurnya. Tahun berikutnya, pada 1999, sisa-sisa pasukan Khmer Merah yang terakhir berhasil dikalahkan. Khieu Samphan dan Nuon Chea terus hidup dengan damai di Pailin bersama sejumlah mantan rekan seperjuangan mereka hingga akhirnya mereka dipanggil untuk diadili.

TRIBUNAL KHMER MERAH

Pada tahun 1997, pemerintah Kamboja meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk sebuah tribunal (Pengadilan) guna membawa para pemimpin tertinggi Khmer Merah ke hadapan pengadilan. Diperlukan waktu enam tahun lagi sebelum kesepakatan tersebut tercapai pada tahun 2003. Kamar-Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC), yang juga dikenal sebagai Tribunal Khmer Merah, merupakan pengadilan hibrida, yang berarti pengadilan tersebut memiliki hakim dan jaksa internasional maupun nasional. Tujuan pengadilan ini adalah mengadili para pemimpin tertinggi Khmer Merah yang masih hidup dan mereka yang paling bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi selama masa Kampuchea Demokratis. Kejahatan yang ditangani mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang berat.

Pada tahun 2007, lima pemimpin tertinggi Khmer Merah ditangkap dan ditahan untuk menunggu persidangan. Hal ini merupakan titik balik yang penting dalam sejarah periode setelah kekuasaan Khmer Merah, karena menjadi tanda bahwa para pemimpin tertinggi tidak lagi terbebas dari pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan mereka selama masa pemerintahan mereka. Pada 30 Maret 2010, pengadilan memulai proses persidangannya dengan mengadili Kaing Guek Eav, alias Duch, yang sebelumnya bertanggung jawab atas penjara S-21.

Ini merupakan kasus pertama dari empat kasus yang direncanakan (meskipun kasus-kasus lainnya juga akan dipertimbangkan). Pada tahun 2010, Duch dinyatakan bersalah atas berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nuon Chea dan Khieu Samphan merupakan tokoh berikutnya yang diadili, dengan dakwaan terhadap mereka yang mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap kelompok minoritas etnis Vietnam dan Muslim Cham. Kedua pria tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bagian kedua dari persidangan mereka, yang mencakup tuduhan genosida, masih berlangsung (hingga Agustus 2016).

Meskipun Tribunal tersebut sebagian besar dianggap berhasil, lembaga ini juga menjadi sasaran kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa pemerintah Kamboja di bawah Perdana Menteri Hun Sen telah menunda proses tribunal dan membatasi jangkauannya. Penundaan yang berkepanjangan tersebut menyebabkan banyak pemimpin tertinggi yang telah lanjut usia meninggal sebelum mereka dapat diadili, termasuk Pol Pot, Ieng Sary, dan Ta Mok. Mereka bukan hanya tidak pernah dibawa ke hadapan pengadilan, tetapi kesaksian yang mungkin dapat mereka berikan juga hilang untuk selamanya. Selain itu, banyak warga Kamboja mengeluhkan lamanya proses persidangan dan besarnya biaya yang dikeluarkan. Sebagian pihak berpendapat bahwa uang yang dihabiskan untuk tribunal tersebut seharusnya dapat digunakan dengan lebih baik untuk meningkatkan kehidupan rakyat Kamboja saat ini, yang banyak di antaranya hidup dalam kemiskinan yang sangat parah.

Dari sisi yang positif, tribunal tersebut telah menciptakan kesempatan bagi para korban maupun para pemimpin untuk memberikan kesaksian mereka—sesuatu yang membantu melengkapi lembaran-lembaran dari babak kelam sejarah Kamboja ini. Tribunal tersebut juga menghasilkan pendidikan melalui ECCC serta melalui buku-buku pelajaran dan pengajaran yang telah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagian dari sejarah Kamboja ini, sekaligus menjembatani pemahaman antara generasi muda dan generasi tua Kamboja. Kenyataannya, banyak generasi muda Kamboja tidak mempercayai kisah-kisah yang mereka dengar dari orang tua mereka mengenai pengalaman selama periode Khmer Merah. Namun, tribunal tersebut bukan satu-satunya sumber keadilan dan pemulihan bagi rakyat Kamboja, yang memiliki kebudayaan yang kaya dan tangguh serta cara-cara mereka sendiri untuk menghadapi dan memahami berbagai kekejaman yang menghancurkan seperti ini. Bahkan sebelum tribunal tersebut dibentuk, rakyat Kamboja telah melaksanakan upacara-upacara untuk merawat arwah orang-orang yang telah meninggal; menafsirkan periode Khmer Merah melalui berbagai peristiwa sejarah lain yang menghancurkan, seperti kenangan tentang invasi Thailand pada abad ke-19 yang membawa kehancuran dan memperbudak rakyat Kamboja (sebagaimana disebutkan pada awal tulisan ini); serta mencari cara untuk menceritakan sejarah mereka dan menghubungkan kembali diri mereka dengan masa lalu yang ada sebelum Khmer Merah.

Selain itu, sebagai negara yang menganut agama Buddha, penyembuhan dan rasa keadilan diwujudkan melalui konsekuensi karma. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian anggota Khmer Merah tingkat bawah yang melakukan kekejaman kini mengabdikan diri di kuil-kuil Buddha atau membantu menyembuhkan orang sakit melalui pengobatan tradisional. Tidak semua mantan pelaku kekejaman ini dimaafkan, dan sebagian tetap dikucilkan. Namun, terdapat sejumlah orang yang telah diterima kembali ke dalam komunitas tempat mereka tinggal melalui toleransi dan terkadang pengampunan yang bersumber dari pemahaman tentang tatanan Buddhis, di mana keadilan diwujudkan melalui kelahiran kembali berdasarkan karma. Ini hanyalah beberapa dari sekian banyak sumber penyembuhan dan keadilan yang menjadi bagian dari kebudayaan dan tradisi Khmer.

Catatan: Mayoritas materi artikel ini merupakan hasil terjemahan dan editan dari Esai: Cambodia: The Rise and Fall of the Khmer Rouge Regime, Eve Monique, Asia Pacific Foundation of Canada.

Jakrta, 12 Oktober 2026